

EDISI 2

## DARI KRISIS KOORDINASI MENUJU KOORDINASI KRISIS: PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA

**Narasumber:**  
Purwo Santoso  
Cornelis Lay

**Perumus:**  
Wawan Mas'udi  
Azifah R. Astrina

Sumber foto sampul:  
<https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/covid-19-jokowi-must-win-back-people-s-trust-after-early-missteps>

Policy Brief FISIPOL UGM Seri 2 COVID-19 ini akan menjawab pertanyaan: “*bagaimana bentuk koordinasi yang harus dibangun oleh pemerintah di tengah krisis pandemi COVID-19?*” Sejak pertengahan Maret 2020, pemerintah mulai secara serius mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk merespon semakin bertambahnya jumlah penderita positif COVID-19. Kebijakan-kebijakan ini hadir bukan tanpa kritik; bukan hanya karena pesan kebijakan yang tidak jelas, namun juga absennya koordinasi dan sinergi. Dua aspek terakhir ini menunjukkan kelemahan mendasar penanganan COVID-19 di tanah air.

Dalam situasi dimana penyebaran virus kian cepat dan meluas setiap harinya, koordinasi antar institusi-institusi yang bertanggung jawab menjadi poin fundamental yang dapat meminimalisir risiko lebih buruk dari penyebaran wabah. Koordinasi di sini semestinya tidak semata diletakkan dalam terminologi teknokratik yang menunjukkan adanya kerja sama antar instansi dalam konteks administratif untuk menjamin berfungsinya proses penanganan, namun lebih sebagai sistem logis yang menjadi mentalitas otomatis para pemegang otoritas untuk bersikap responsif dalam situasi krisis. Sebagai sistem logis, koordinasi dapat dimulai dari lapis mana saja dan tidak terjebak dalam hirarki kekuasaan, serta dapat bersifat *top-down* maupun *bottom-up*.

Contact Person: +62 822 2074 2201 (Media FISIPOL UGM)



## Krisis Koordinasi Penanganan COVID-19

### Pertama

#### Absennya Koordinasi Sebagai *Mindset* Tata Kelola

Koordinasi dan sinergi menjadi masalah laten dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Terlepas dari apapun karakter rejim yang berkuasa, kontestasi dan ketidaksinkronan antar aktor pemerintahan menjadi praktek kekuasaan sehari-hari. Dalam situasi normal, absennya koordinasi maksimal akan berdampak pada efisiensi, maladministrasi dan korupsi. Namun, dalam situasi krisis, absennya koordinasi akan berdampak jauh lebih menghancurkan, karena mempertaruhkan nilai-nilai keselamatan dan kemanusiaan. Lebih lanjut, dari sisi teknokratis, koordinasi terlalu disederhanakan dalam urutan kerja birokrasi dan kerapian administrasi dalam kondisi normal pemerintahan. Ini pun masih sangat susah diwujudkan. Dalam periode krisis, koordinasi cenderung semakin sulit dijalankan, terlebih ketika *mindset* lembaga dan aktor pemerintahan cenderung melihat dari sisi kepentingannya. Diperparah dengan tidak adanya kelincahan institusi pemerintahan untuk bergeser dari track *normal* ke track *abnormal*, koordinasi di masa krisis menjadi permasalahan tata kelola sangat fundamental.





## Kedua

### Kontestasi dan Miskoordinasi Antar Aktor Pemerintahan

Sejauh ini, model koordinasi yang dibangun oleh pemerintah terpusat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang bertugas menjembatani jalur koordinasi dari puncak pemerintahan, Presiden, sampai ke tingkat seluruh lini dan level pemerintahan, dan bahkan masyarakat. Meskipun sistem koordinasi yang bersifat *top-down* sudah coba dibangun lewat perangkat kelembagaan maupun perundangan, kontestasi dan miskoordinasi di intra pemerintahan, baik secara horizontal dan vertikal, masih berlangsung. Secara horizontal, seringkali antar instansi maupun pejabat pemerintahan mengeluarkan statemen yang tidak sinkron dengan garis penanganan krisis. Secara vertikal, masih banyak daerah yang mengambil inisiatif atau mengeluarkan pernyataan di luar jalur koordinasi pemerintahan. Seiring dengan keluarnya sejumlah peraturan pemerintah, koordinasi memang jauh lebih baik, namun berbagai tantangan di level operasional penanganan krisis yang membutuhkan sinergi masih akan berlangsung.



## Ketiga

### Diskoneksi Antara Kebijakan Pemerintah dengan Inisiatif Masyarakat

Salah satu bentuk manifestasi dari problema koordinasi yang muncul adalah kebingungan di tingkat publik. Kebingungan publik atas situasi krisis menandakan kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap diseminasi informasi dan kebijakan pemerintah. Jika berlanjut, situasi ini bisa berujung pada deligitimasi terhadap institusi publik yang mengelola krisis, bahkan sistem pemerintahan secara keseluruhan. Kebingungan di level pemerintahan yang lebih bawah ataupun masyarakat disebabkan oleh ketidakjelasan institusi mana yang bertanggung jawab menangani krisis dan apa yang harus dilakukan masing-masing pihak dalam menghadapi situasi krisis. Situasi ini telah melahirkan diskoneksi antara kebijakan pemerintah dengan inisiatif masyarakat. Di banyak tempat, masyarakat berinisiatif membangun mekanisme tanggap darurat secara komunal, dalam bentuk karantina wilayah berbasis desa/kampung, dusun, dan bahkan RT/RW. Jika situasi ini terus berlangsung, niscaya krisis COVID-19 akan bisa melahirkan krisis sosial berupa tindakan-tindakan berbasis ikatan-ikatan eksklusif sebagai bentuk perlindungan komunal.

# Rekomendasi : Fondasi Koordinasi Krisis

## 1. Penegasan *Mindset* Kemanusiaan dalam Koordinasi Krisis

Sistem koordinasi krisis memiliki fondasi nilai tunggal yang kokoh, yaitu kemanusiaan. Bahwa yang pertama dan terutama dalam semua bentuk tata kelola krisis adalah memastikan keselamatan dan nyawa manusia. Segala bentuk aturan dan aspek birokrasi menjadi tidak relevan lagi jika penegakannya justru menempatkan keselamatan dan nyawa warga negara dalam ancaman. Untuk itu, perlu penegasan visi dari para Pemimpin Politik dan Pemerintahan, bahwa kemanusiaan menjadi pertimbangan utama dalam sistem koordinasi krisis untuk menangani COVID-19.

## 2. *Coordinated Flexibility* dalam Pembagian Peran dan Kewenangan

Situasi krisis COVID-19 yang berlangsung sangat dinamis membutuhkan fleksibilitas kebijakan dan tindakan-tindakan di lapangan. Model pembagian dan pelaksanaan kewenangan normal yang rapi tidak lagi relevan dengan situasi krisis yang berlangsung, karena justru akan menjadi hambatan bagi penanganan krisis. Sementara itu jika masing-masing pihak dibiarkan mengambil langkah-langkah mandiri justru akan melahirkan situasi tata kelola yang anarkis. Untuk itu, yang dibutuhkan adalah fleksibilitas untuk melakukan *adjustment* kewenangan dari waktu ke waktu, di bawah sistem kendali yang bersifat koordinatif. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, sangat mungkin penanganan di masing-masing wilayah akan berbeda, oleh karena sistem kendali kewenangan yang bersifat fleksibel sangat diperlukan.

## 3. Inkorporasi Komunitas dalam Garis Koordinasi

Meluasnya krisis COVID-19 bisa berujung pada ketidakmampuan kapasitas negara untuk menangani dampaknya. Sementara itu, di luar negara tersebar berbagai kapasitas yang bisa bergerak secara otomatis dan sukarela untuk berkontribusi menangani krisis. Kapasitas komunitas ini menyebar di masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan berbagai komunitas. Untuk itu pemerintah perlu mengembangkan model koordinasi yang meng-inkorporasi-kan keterlibatan berbagai kekuatan sosial (RT/RW, komunitas berbasis identitas, NGO, bisnis, dll.) dalam menangani COVID-19.